



**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 1/DPRD.LPG/III.01/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG ATAS LAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA ATAS UPAYA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2021 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DAN PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI BERBASIS KERJA SAMA INDUSTRI DAN DUNIA KERJA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TAHUN ANGGARAN 2020 SAMPAI DENGAN SEMESTER I 2021 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Menimbang** : bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung Atas Laporan Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Provinsi Lampung Di Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya dan Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Semester I 2021 Pada Pemerintah Provinsi Lampung Di Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor 092 /F-PDI-P/DPRD/I/2022 tanggal 12 zews Januari 2022 Perihal Nama-Nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang akan duduk dalam Panitia Khusus;
  2. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor :02/F-Gerindra/DPRD.LPG/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra Yang Duduk Dalam Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung;
  3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 02/FPG/I/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Nama-nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
  4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 03/F-PD/DPRD/2022 tanggal Januari 2022 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
  5. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 02/F-NasDem/DPRD/I/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Nama- nama Anggota F NasDesm Yang Akan Duduk Di Panitia Khusus;
  6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 05/F-PKB/DPRD/01/2022, tanggal 10 Januari 2022 perihal Nama - Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Pansus;
  7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 141/FPKS/I/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Usulan Nama-Nama Anggota DPRD Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
  8. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor : 64/F-PAN/DPRD/I/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Nama Anggota F-PAN DPRD Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;

9. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 12 Januari 2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG ATAS LAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA ATAS UPAYA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2021 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DAN PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI BERBASIS KERJA SAMA INDUSTRI DAN DUNIA KERJA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TAHUN ANGGARAN 2020 SAMPAI DENGAN SEMESTER I 2021 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA.**

**KESATU** : **Membentuk Panitia Khusus pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung Atas Laporan Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Provinsi Lampung Di Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya dan Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Semester I 2021 Pada Pemerintah Provinsi Lampung Di Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

**KEDUA** : **Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimulai sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 12 Januari 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA**

Ttd

**MINGRUM GUMAY**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 1/DPRD.LPG/III.01/2022  
TANGGAL : 12 Januari 2022

---

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG ATAS LAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA ATAS UPAYA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2021 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DAN PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI BERBASIS KERJA SAMA INDUSTRI DAN DUNIA KERJA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TAHUN ANGGARAN 2020 SAMPAI DENGAN SEMESTER I 2021 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

KETUA : SITI RAHMA,SE.,MH.  
WAKIL KETUA : APRILLIATI,SH.,MH.  
SEKRETARIS : Dra. JAUHAROH,MM.  
ANGGOTA : 1. H. YANUAR IRAWAN,SE.,MM.  
2. BUDHI CONDROWATI,SE.  
3. LENISTAN NAINGGOLAN,SH.  
4. MIRZALIE SS,SH.,MKn.  
5. I MADE SUARJAYA,SH.,MH.  
6. VERI AGUSLI HTB,SE.  
7. DARLIAN PONE,SH.,SE.,MM.  
8. Hi. ALI IMRON,S.Fil.  
9. FERDY FERDIAN AZIS,SH.  
10. DENI RIBOWO,SE.  
11. ASEP MAKMUR  
12. Hj. Dr. ASIH FATWANITA,MM.  
13. MAULIDAH ZAUROH,Ma.Pd.  
14. H. SEMIN,S.Pd.I.  
15. H. SYARIF HIDAYAT, ST.,MM.  
16. H. AHMAD FITONI  
17. Drs. DARWIN HIFNI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA**

Ttd

**MINGRUM GUMAY**